



Tonggak Sejarah Baru: Teras Malioboro Resmi Jadi BLUD, Tenan Antusias Tandatangan PKS Retribusi

SELAMA empat tahun terakhir, Teras Malioboro telah diberikan subsidi penuh untuk seluruh fasilitas tempat berjualan oleh Pemda DIY, sebagaimana arahan Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X saat pembukaan Teras Malioboro Eks Indra pada beberapa tahun yang lalu.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan penuh sekaligus keberpihakan, berupa pemberian insentif dari Pemerintah Daerah, guna mengawal masa transisi dan penataan kawasan Malioboro. Secara terukur, Teras Malioboro memasuki babak baru, dan bersiap melakukan transformasi besar untuk menjadi kawasan pusat perbelanjaan yang lebih tertata, modern, dan berkelanjutan.

Langkah awal transformasi ini ditandai dengan perubahan besar pada status tata kelola kelembagaan. Teras Malioboro kini telah resmi bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tepat pada tanggal 22 Juni 2026, Teras Malioboro menerima Keputusan Surat Gubernur DIY Nomor 138 Tahun 2026 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Status baru ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan demi meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat dan para tenan.

Sebagai tindak lanjut dari status baru tersebut, proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait retribusi antara pengelola dan para tenan mulai dilaksanakan. Sejak 18 Juni lalu, para Tenan Teras Malioboro yang menempati bangunan Teras Malioboro eks Gedung Indra, mulai melakukan penandatanganan PKS dengan penuh antusias. Respons positif dari para tenan terlihat sangat signifikan. Hingga hari ini (27), tercatat sudah lebih dari 82% tenan yang menyelesaikan proses administrasi PKS, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai melakukan pembayaran retribusi yang berlaku berlangsung pada bulan Juli 2026.

Salah satu tenan Teras



Salah satu tenan TM Eks Indra menyatakan persetujuan atas kesepakatan pembaruan kontrak retribusi.

Malioboro Eks Indra yang sudah berlangsung lama dan pasca terdapat penyesuaian serta harmonisasi regulasi, maka komitmen penandatanganan ini baru bisa terjadi pada awal Juli 2026 ini. Sosok kelahiran Blitar ini juga menegaskan, "Pihak pengelola berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik serta berbagai kemudahan selama proses administrasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung. Kami memastikan bahwa setiap



Suasana layanan penandatanganan kontrak retribusi antara tenan dengan pengelola pada Gedung Cendrawasih Kawasan Teras Malioboro.

ngelola diharapkan bisa memberikan layanan yang semakin baik, seperti fasilitas yang membuat tenan maupun pengunjung menjadi nyaman berbelanja" tuturnya. Harapannya, pasca penandatanganan kontrak ini, usaha perdagangan di Teras Malioboro semakin laris dan terus didatangi wisatawan secara masif.

Kepala UPTD Balai Layanan Usaha Terpadu KUMKM, Wismu Hermawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap kooperatif dan antusias para tenan selama proses ini berjalan. Proses menuju kesepakatan ini sebenarnya

jamin karena dana langsung masuk ke dalam sistem perbankan. Untuk memberikan kemudahan, Bank BPD DIY juga akan membuka stan loket pembayaran khusus di area Teras Malioboro setiap akhir bulan. Langkah kolaboratif ini diharapkan untuk mendekatkan layanan, sehingga para tenan dapat menunaikan kewajibannya dengan mudah tanpa harus meninggalkan aktivitas berdagang.

Senada dengan hal tersebut, Agus Mulyono, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY menyambut baik atusiasme para tenan dalam melakukan pembaruan kerjasama kontrak. Pada sisi lain, sosok pria kelahiran Sragen ini juga menyampaikan bahwa penetapan status BLUD bagi UPTD Balai Layanan Usaha Terpadu KUMKM DIY merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Beliau menyatakan, "Dengan status baru tersebut, BLUD KUMKM DIY diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai pusat layanan dan pengembangan usaha yang mendukung peningkatan daya saing UMKM daerah, khususnya para tenan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM di DIY."

Melalui transformasi menjadi BLUD dan pemberlakuan retribusi yang transparan ini, Teras Malioboro diharapkan dapat tumbuh menjadi kawasan wisata belanja yang otonom secara finansial. Tujuan jangka panjang dari kebijakan ini adalah agar Teras Malioboro tidak lagi membebani anggaran Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan mampu efektif berkreasi dan berkontribusi positif dalam memberikan pendapatan asli daerah bagi Pemda DIY. Kemendanaan finansial ini nantinya akan dikembalikan secara utuh dalam bentuk peningkatan kualitas layanan terhadap para tenan, program promosi pariwisata yang lebih masif, serta terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh tenan Teras Malioboro, dan tentunya stabilitas Kawasan Sumbu Filosofi yang terus hidup berkelanjutan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005